



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021  
TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19  
KE PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL 18 S.D. 20 JUNI 2021**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia. Saat ini di banyak daerah sudah memiliki tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU pasien Covid-19 yang melebihi 70 persen. Padahal, ambang batas *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau rasio keterisian tempat tidur menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di angka 60 persen. Selain itu, di beberapa wilayah Indonesia, situasi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan di posyandu dan puskesmas di beberapa daerah.

Tidak hanya di sektor kesehatan, COVID-19 juga berdampak nyata ke sektor perekonomian, sosial, pariwisata, dan pendidikan. Sehingga intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga dalam hal memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya menimbulkan kekebalan tubuh dengan pemberian vaksin atau imunisasi.

Atas dasar itulah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diikuti dengan berbagai peraturan lebih teknisnya seperti Peraturan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah menentukan jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020. Ada 7 jenis vaksin yang dapat

digunakan untuk program vaksinasi yaitu vaksin Sinovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan COVID-19, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 telah ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization* (SAGE WHO). Pemerintah juga telah menetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:


- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
- b. tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga;
- c. guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi;
- d. aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif; masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- e. masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.






Saat ini, Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei

2021, menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Dalam PMK yang baru, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong dengan ketentuan bahwa jenis vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain. Vaksin COVID-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata. Dalam PMK yang baru ini juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Hingga saat ini Badan POM RI telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) vaksin Sinovac pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Efikasi vaksin Sinovac pada saat EUA diterbitkan yaitu 65,3 % dan di atas ambang batas yang ditentukan oleh WHO sebesar 50%. Selain itu, BPOM juga telah mengeluarkan EUA untuk vaksin Astrazeneca/SK-Bio Korea.

**WAKSIN COVID-19 DI INDONESIA**

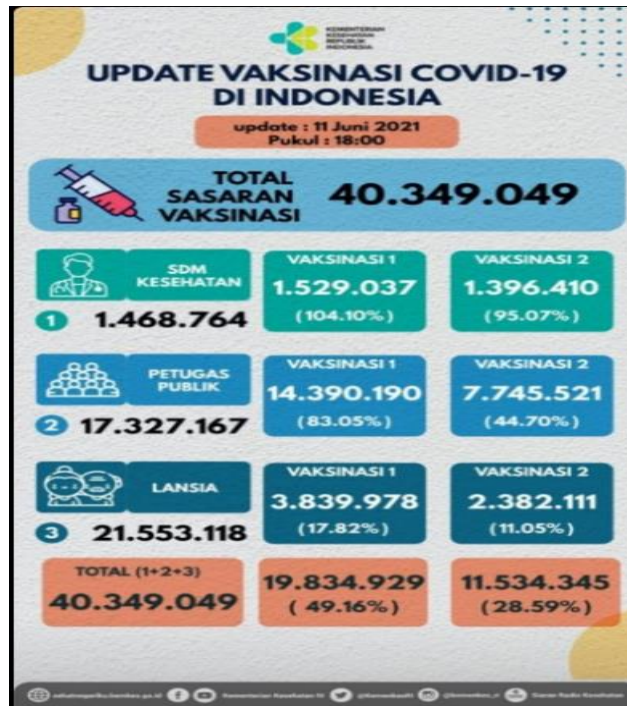


Sudah mendapat EUA	Sedang Proses Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <span>• Coronavac (Sinovac)</span> </li> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <span>• Vaksin COVID-19 (Bio Farma)</span> </li> <li style="display: flex; align-items: center;">  <span>• Covid-19 Vaccine AstraZeneca (Astra Zeneca/SK-Bio Korea)</span> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <span>• Covid-19 Vaccine AstraZeneca (Idt biologica germany)</span> </li> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <span>• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (Sinopharm)</span> </li> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <span>• Sputnik V (Gamaleya/Gerenium-Rusia)</span> </li> <li style="display: flex; align-items: center;">  <span>• Covovax (Novavax/SII)</span> </li> </ul>

Harus memenuhi syarat yang sama yaitu data pre-klinik, klinik dan mutu yang memenuhi standard yang diakui dan berlaku secara Internasional. Pemastian pemenuhan GLP, GCP/CUKB dan GMP dilakukan oleh otoritas obat setempat.

10

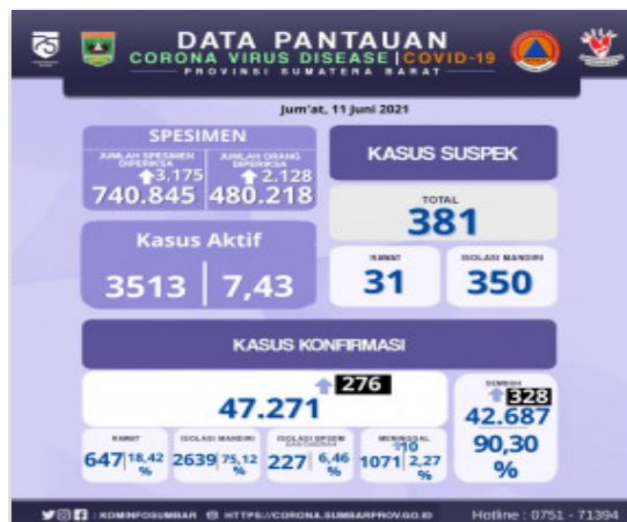
Per tanggal 11 Juni 2021, update yang dirilis Kementerian Kesehatan RI untuk update vaksinasi diIndonesia adalah sebagai berikut :



### Perkembangan COVID-19 dan Proses Vaksinasi Sumatera Barat

Jumlah penduduk Sumatera Barat untuk tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 5.534.472 jiwa yang tersebar di 19 kota/kabupaten.

Dalam laporan harian data pantauan COVID-19 yang dirilis oleh Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa per tanggal 11 Juni 2021 terdapat 276 kasus konfirmasi, sehingga total keseluruhan menjadi 47.271 kasus positif dengan jumlah yang sembuh adalah 42.687 orang dan jumlah kematian sebesar 1071 kasus. Untuk positivity rate Provinsi Sumatera Barat saat ini adalah 9,85%.



Dengan kasus yang saat ini cenderung meningkat di Sumatera Barat, capaian vaksinasi justru dinilai sangat rendah, dari data Dinas Kesehatan Sumatera Barat hingga 28 Mei 2021, jumlah cakupan vaksinasi sekitar 186.006 orang atau 21,27 % dari total sasaran 874.698 orang, dengan rincian :

- a. vaksinasi untuk lansia mencapai 11.739 orang dari total sasaran 442.003, atau sekitar 2,66%.
- b. vaksinasi untuk petugas pelayanan publik mencapai 135.004 orang dari total sasaran 400.274 orang, atau sekitar 33,73%.
- c. vaksinasi SDM Kesehatan 39.263 orang dari total sasaran 32.391 orang, atau sekitar 121,22%.

## **B. LANDASAN**

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4) huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 18 Mei 2021.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang akses vaksin COVID-19 serta pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam masa pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
3. Memperoleh masukan apakah terdapat permasalahan dalam masa persiapan, pelaksanaan dan pasca vaksinasi COVID-19 ini.

4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat.
5. Menyusun rekomendasi yang dapat ditunjukkan kepada semua pihak agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

#### **D. KELUARAN (OUTPUT)**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 terutama di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat terlaksana dengan baik.

#### **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan :

1. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat;
2. Direksi RSUP DR. M. Djamil Padang;
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Balai Besar POM di Padang;
5. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang;
6. KOMDA KIPI Sumatera Barat;
7. PERSI Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang;
9. DPW APKESMI (Akselerasi Puskesmas Indonesia) Sumatera Barat

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan Tanggal 18 – 20 Juni 2021.

#### **G. SUSUNAN ANGGOTA**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI H. Anshory Siregar, Lc. dari Fraksi PKS. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANGG.	N A M A	Keterangan	FRAKSI	DAPIL
1.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc	KETUA TIM	PKS	SUMUT III
2.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S. Pi., MM	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
3.	A-235	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P	ANGGOTA	PDIP	BALI
4.	A-271	Drs. H. DARUL SISKA	ANGGOTA	P.GOLKAR	SUMBAR I
5.	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M. Kes., MM	ANGGOTA	P.GERINDRA	SUMBAR I
6.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, SE., MM	ANGGOTA	P.GERINDRA	SUMBAR II
7.	A-73	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	P.GERINDRA	SUMSEL II
8.	A-397	drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS	ANGGOTA	P. NASDEM	SULSEL II
9.	A-56	H. HARUNA, M.A., MBA	ANGGOTA	PKB	SULSEL I
10.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M. Si	ANGGOTA	P.DEMOKRAT	JABAR IX
11.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA	P.DEMOKRAT	JATIM I
12.	A-429	dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., Av	ANGGOTA	PKS	JABAR II
13.	A-470	Sy. ANAS THAHIR	ANGGOTA	PPP	JATIM III
14.	-	SURYATNA, S. IP	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
15.	-	SRI LESTARI	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
16.	-	YUNUS ARI TRIAWAN, S.Pd	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
17.	-	LISTYA SHINTYA DEBBY, SE	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
18.	-	DENY FITRIADI, SH., M. Kn	Tenaga Ahli Bidang Kesehatan		
19.	-	RAHAYU SETIOWATI, S. Sos	Pemberitaan		

## H. HASIL KUNJUNGAN

### a. Kasus COVID-19 Sumatera Barat

Data pantauan COVID-19 Sumatera Barat per tanggal 17 Juni 2021 adalah kasus suspek 415, total kumulatif konfirmasi sebanyak 48.441, atau bertambah 191. Kasus aktif saat ini sebanyak 3038 dengan rincian 628 dirawat, 2203 isolasi mandiri, dan 207 isolasi kabupaten/kota. Untuk meninggal bertambah 6 orang sehingga total kumulatif menjadi 1108, dan yang sembuh bertambah menjadi 277 orang, sehingga total kumulatif yang sehat adalah 44295 (91,44%).

### DATA PANTAUAN COVID-19 SUMATERA BARAT Update s/d Kamis, 17 Juni 2021

SPESIMEN		KASUS SUSPEK		KASUS KONFIRMASI					
↑ 2.969	↑ 2.375	415 Total		↑ 191 48.441 Total Komulatif					
753.489	489.366			Kasus Aktif 3038 (6,27%)			Meninggal	Sembuh	
Jumlah Spesimen Diperiksa	Jumlah Orang Diperiksa	34 (8,2%) Rawat	381 (91,8%) Isolasi Mandiri	628 (20,67%) Rawat	2203 (72,51) Isolasi Mandiri	0 (0%) Isolasi Provinsi	207 (6,81%) Isolasi Kab/Kota	↑6 1108 (2,29%)	↑277 44295 (91,44%)

Sumber data:  
 \*Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit se - Sumatera Barat  
 \*Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fak, Kedokteran Universitas Andalas



Puncak kasus terjadi pada minggu ke-32 sebesar 2320 kasus, kemudian mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan lagi menjelang liburan Idul Fitri dan setelah lebaran Idul Fitri.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019*.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan kepada Nagari/Desa :

- a. mendirikan posko desa/nagari penanggulangan dan pencegahan covid-19 dengan peraturan wali nagari/kepala desa



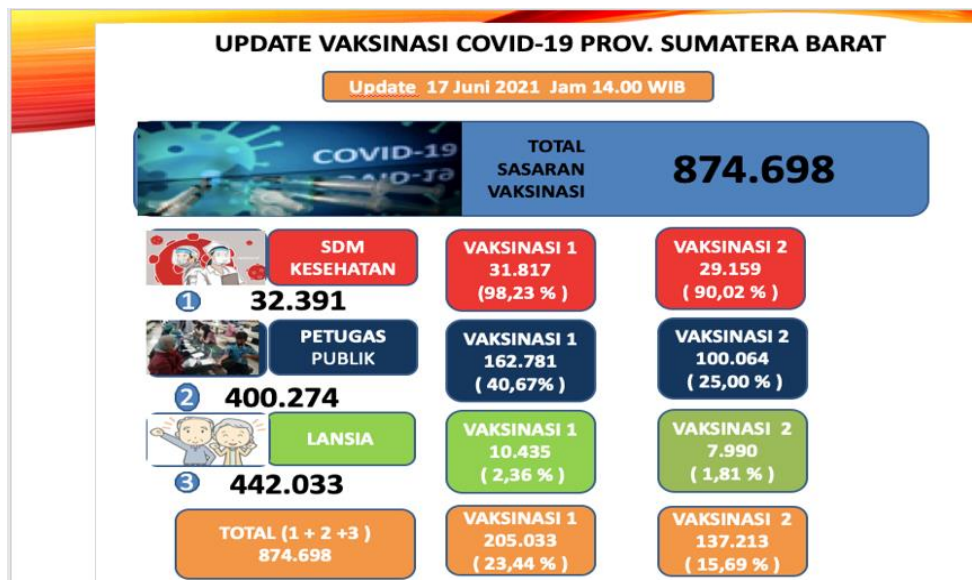
- b. membentuk tim dengan SK Wali Nagari/Kepala Desa yang terdiri dari 4 fungsi :
- tim pencegahan;
  - tim penanganan;
  - tim pembinaan;
  - tim pendukung;
- c. merefocusing dana desa sebesar 8 % untuk penanggulangan covid-19 termasuk operasional posko.

Kendala yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat dalam menekan penyebaran COVID-19 adalah :

- Turunnya *Tracing Ratio* Sumatera Barat, selain ada keengganan masyarakat untuk di swab, tenaga kesehatan untuk *tracking* dan *tracing* juga merupakan vaksinator.
- Turunnya Pemeriksaan Sampel
- Kasus *cluster* meningkat
- Masyarakat tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga risiko penularan tinggi
- Risiko penularan di tempat ibadah (berpotensi)

#### **b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat**

Melihat data terbaru vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat per 17 Juni 2021, vaksinasi untuk lansia dinilai sangat rendah, dimana dari total sasaran 400.274 orang, untuk vaksin tahap 1 baru menyentuh 10.435 orang (2,36%), sedangkan vaksinasi tahap 2 baru dilakukan kepada 7.990 orang (1,81%).



Rendahnya vaksinasi untuk lansia ini menurut pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut :

- a. sulitnya mendatangkan sasaran lansia;
- b. banyak berita hoax yang mengakibatkan masyarakat menjadi takut untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19;
- c. adanya salah pemahaman akibatnya perubahan regulasi yang cepat.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan gerakan gebyar serentak vaksinasi yang dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan sasaran pelayanan publik, lansia dan pra lansia diatas 50 tahun, tenaga pendidik formal dan non formal (bimbel, Paud, sekolah keagamaan).

Tempat kegiatan ditetapkan oleh kabupaten/kota dan puskesmas masing-masing, dengan prinsip jemput bola dengan melibatkan Camat, Wali Nagari/Jorong, Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT untuk mengajak sasaran datang ke tempat vaksinasi dan bertanggungjawab untuk memastikan semua sasaran di wilayah kerjanya sudah mendapatkan vaksinasi.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, saat ini ketersediaan vaksin di Provinsi Sumatera Barat adalah :

Jumlah Vaksin Diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat			STOK VAKSIN COVID-19 YANG TERDAPAT DIBEBERAPA TEMPAT	
No	Jenis Vaksin	Jumlah (dose)	Lokasi	Jumlah Vaksin Covid-19 (Dosis)
1	Sinovac (single dose)	66.800	RSUP M. Djamil	8200
2	Biofarma (multi dose)	291.610	Dinkes Kota Padang	57400
3	Astrazeneca	6.600	Hub Vaksin	6100
4	PT. Enseval	125.800	Kadin	800
5	PT. Indofarma Global Medica	92.400	RS Otak	1800
	Total	583.210	Bidokkes Polda	1500
			Total	75.800

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada RSUP M. Djamil, serta puskesmas-puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam penjelasannya, Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) Sumatera Barat menjelaskan bahwa vaksinator rata-rata berjumlah antara 3 sampai dengan 20 petugas. Untuk penyimpanan vaksin, puskesmas sudah memiliki *cold chain* yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan vaksin COVID-19.

Menurut APKESMI Sumatera Barat, rendahnya tingkat vaksinasi di Sumatera Barat disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. masih tinggi pengaruh negatif (berita *hoax*) dari media sosial sehingga sangat sulit meyakinkan masyarakat.
2. Indeks Pemakaian (IP) vaksin terlalu besar (10), sehingga ketika sasaran kurang dari 8 orang tidak bisa membuka vaksin, padahal mencari sasaran sudah cukup sulit.
3. masih ada ASN, pemangku kebijakan, pelayan publik, tokoh masyarakat, tokoh agama yang belum bersedia untuk di vaksin.
4. belum ada punishment terhadap ASN (diluar bidang kesehatan) dalam peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19.
5. minimnya peran alim ulama, untuk ikut mensosialisasikan vaksinasi ke sasaran dengan kelompok tertentu.

6. minimnya sosialisasi ke lansia dan pra lansia karena belum bisa menjangkau sasaran secara merata (belum semua lansia ikut posyandu lansia).

Atas kendala-kendala tersebut, APKESMI memberikan beberapa anjuran terkait hal tersebut, yaitu :

1. kemasan vial diperkecil
2. diharapkan ada kemasan vaksin yang single dose mengingat sulitnya mencari sasaran.
3. optimalisasi sosialisasi melalui media.
4. diharapkan adanya aturan yang mengikat untuk ASN/masyarakat untuk vaksinasi COVID-19.
5. Kerjasama seluruh stake holder untuk meningkatkan sasaran vaksinasi.

Selain hal-hal diatas sangat penting untuk diperhatikan dan masih menjadi hambatan, Balai Besar POM Kota Padang juga menggarisbawahi beberapa hal dalam pendistribusian vaksin yang juga patut mendapat perhatian besar dari Balai Besar POM, mengingat hal itu menjadi awal kesuksesan program vaksinasi.

Adapun hal-hal tersebut adalah :

1. Penerapan aspek-aspek cara distribusi vaksin disarana Instalasi Farmasi Pemerintah masih belum dilaksanakan secara menyeluruh.
2. Sarana prasana belum memadai dalam pengelolaan vaksin di Instalasi Farmasi Pemerintah dan Sarana Pelayanan Kesehatan, seperti :
  - a. jumlah thermometer yang dimiliki sarana Instalasi Farmasi Pemerintah dan sarana Pelayanan Kesehatan tidak mencukupi untuk melakukan pemantauan suhu.
  - b. tidak dilakukan kalibrasi berkala terhadap peralatan yang digunakan untuk penyimpanan dan monitoring suhu vaksin.
  - c. kapasitas tempat penyimpanan vaksin yang terbatas di sarana Pelayanan Kesehatan.

3. Personil yang terlibat dalam pengelolaan vaksin belum secara penuh memahami cara pengelolaan vaksin yang baik.
4. Kondisi geografis dan ketersediaan aliran listrik terutama di daerah-daerah terpencil.

## **I. REKOMENDASI**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus berupaya menyediakan alat diagnostik COVID-19 dalam mendukung upaya *tracking* dan *tracing* yang saat ini dinilai sangat menurun di Sumatera Barat.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus melakukan sosialisasi di daerah-daerah dengan melibatkan seluruh stake holder dan mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk terus meningkatkan pendampingan dalam upaya distribusi vaksin dan memastikan bahwa vaksin yang digunakan saat vaksinasi masih dalam mutu yang baik.

## **J. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020 – 2021 tentang Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, 20 Juni 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA**

*ttd*

**H. ANSHORY SIREGAR, Lc.**  
**A-414**